

ANALISIS KONDISI DAN DISTRIBUSI POTENSI EKONOMI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

**Martina Ayu Sejati¹, Poppy Haryani², Tugma Jaya Manalu³, Arfita
Rahmawati⁴, Febriyanti Angelia Ginting⁵**

^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Geografi

Universitas Nusa Cendana Kupang

⁵Program Studi Teknik Lingkungan

Universitas Proklamasi 45

martina_sejati@staf.undana.ac.id

Artikel Info : diterima 20/05/2025, revisi 30/05/2025, publish 12/06/2025

ABSTRACT

An important aspect in describing the success of development is through analyzing the economic conditions of the region. Economic analysis also plays an important role in assessing regional inequality. Kabupaten Sumbawa Barat is one of the regions that has a diversity of resources and has various types of economic sectors. The objectives of this research include: (1) Analyzing the regional financial capacity in Kabupaten Sumbawa Barat; (2) Analyzing the Economic Base Sector by business field in Kabupaten Sumbawa Barat in 2019-2023; and (3) Analyzing the value of Economic inequality in Kabupaten Sumbawa Barat. The method applied in this research is quantitative descriptive method with secondary data from the Central Bureau of Statistics, and related agencies. The calculation techniques used are: Calculation of regional financial capability (Degree of Fiscal Decentralization); Financial Independence (Degree of Fiscal Autonomy); Location Quotient (LQ); and Williamson Index. The results showed that the value of the Degree of Fiscal Decentralization (DDF) in Kabupaten Sumbawa Barat in 2019 was 6% and fell into the category of very less, while for 2020 to 2023 it was 13% and fell into the category of less. Meanwhile, the value of the Degree of Fiscal Autonomy (DOF) in 2019 is the lowest value, namely 11.3 and has increased in 2023 to 22 and is included in the concurrency classification. The base sector is the mining and quarrying sector (4.78). The other three sectors that have the highest value and potential are the transportation and storage sector (0.31), the construction sector (0.29) and the agriculture, forestry and fisheries sector (0.29). While the sector with the lowest value is the processing industry (0.07). The value of economic inequality using the Wiliamson Index shows an inequality value of 0.77 and falls into the high inequality category.

Keywords: *Economic Potential, Gross regional domestic product (GRDP), Economic Base, Leading Sector.*

ABSTRAK

Aspek penting dalam keberhasilan pembangunan yaitu melalui analisis kondisi ekonomi wilayah. Analisis ekonomi juga berperan penting dalam menilai ketimpangan wilayah. Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki keberagaman sumberdaya dan memiliki berbagai jenis sektor ekonomi. Tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu: (1) Menganalisis kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat; (2) Menganalisis Sektor Basis Ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019-2023; dan (3) Menganalisis nilai ketimpangan Ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik, dan Instansi terkait.

Jurnal Geografi Volume 21 Nomor 1 Juni 2025

Teknik perhitungan yang digunakan yaitu: Perhitungan Kemampuan keuangan daerah (Derajat Desentralisasi Fiskal); Kemandirian keuangan (Derajat Otonomi Fiskal); *Location Quotient* (LQ); dan *Indeks Williamson*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019 yaitu 6% dan masuk kedalam kategori sangat kurang, sedangkan untuk tahun 2020 sampai 2023 yaitu 13% dan masuk ke dalam kategori kurang. Sedangkan Nilai Derajat Otonomi Fiskal (DOF) di tahun 2019 merupakan nilai terendah yaitu 11,3 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 22 dan masuk ke dalam klasifikasi konkurensi. Sektor basis yaitu sektor pertambangan dan penggalian (4,78). Tiga sektor lainnya yang memiliki nilai tertinggi dan berpotensi yaitu sektor transportasi dan pergudangan (0,31), sektor konstruksi (0,29) dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (0,29). Sedangkan sektor dengan nilai terendah yaitu industri pengolahan (0,07). Nilai ketimpangan ekonomi menggunakan *Indeks Williamson* menunjukkan nilai ketimpangan sebesar 0,77 dan masuk kedalam kategori ketimpangan tinggi.

Kata Kunci: Potensi Ekonomi, PDRB, Basis Ekonomi, Sektor Unggulan.

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan dasar dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Untuk menjalankan fungsi ini, pemerintah daerah membutuhkan sumber daya keuangan yang memadai dan berkelanjutan. Analisis kemampuan keuangan daerah menjadi penting untuk memahami kesehatan keuangan suatu daerah baik berupa potensi dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Dinamika ekonomi lokal memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan keuangan daerah. Perubahan dalam pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan struktur industri dapat mempengaruhi pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi (Awandari dkk, 2016). Oleh karena itu, analisis ekonomi lokal perlu dilakukan untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dengan keuangan daerah.

Banyak daerah menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan mereka, termasuk ketergantungan pada transfer pusat, rendahnya pendapatan asli daerah, dan terdapatnya utang daerah yang tinggi. Menurut Arsyad (1999) bahwa analisis kemampuan keuangan daerah dapat membantu dalam mengidentifikasi keterbatasan dan risiko potensial yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan daerah. Analisis kemampuan keuangan daerah dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sumber daya keuangan dialokasikan, digunakan, dan diinvestasikan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang (Halim, 2012).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menyatakan bahwa sektor paling dominan dalam menyumbang pendapatan terbesar bagi Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pada sektor pertambangan yaitu 14.970,55 Milyar. Hal ini menjadi salah satu potensi namun juga menjadi salah satu tantangan besar sebab, daerah dengan sektor yang mengandalkan sumberdaya 11 tidak terbaharukan akan cenderung berdampak besar apabila sumber daya tersebut habis nantinya. Berbagai jenis antisipasi dan pengembangan pada sektor lainya perlu untuk digali dan dianalisis dari segi potensi agar dapat menjadi alternatif, maka dari itu diperlukan analisis baik kondisi keuangan maupun potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Analisis kemampuan keuangan daerah juga penting dalam mengevaluasi kebijakan dan intervensi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami dampak dari berbagai kebijakan keuangan, pemerintah daerah dapat menyesuaikan strategi untuk mencapai hasil yang lebih baik (Suparmoko, 2003). Meskipun telah ada beberapa penelitian tentang kemampuan keuangan daerah, masih ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut yang mendalam dan terfokus. Terutama dalam konteks dinamika ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat yang terus berubah dan kompleksitas kebijakan fiskal, penelitian terbaru dapat memberikan wawasan baru yang penting bagi praktisi dan pembuat kebijakan. Analisis kemampuan keuangan daerah merupakan elemen kunci dalam memahami kesehatan keuangan suatu wilayah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Christianingrum & Aida, 2021). Dengan memperhatikan konteks ekonomi lokal, keterbatasan keuangan, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan keuangan daerah.

Kondisi perekonomian wilayah juga memiliki keterkaitan dengan ketimpangan yang ada. Ketimpangan ekonomi antar wilayah telah menjadi permasalahan yang mendesak di banyak negara di seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan disparitas dalam perkembangan ekonomi antara wilayah yang maju dan tertinggal, tetapi juga menggambarkan kesenjangan yang dalam dalam akses terhadap kesempatan dan sumber daya. Menurut Rajab & Jamaludin (2021) wilayah-wilayah yang tertinggal sering kali mengalami kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Ketimpangan ini sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan potensi ekonomi, distribusi sumber daya alam, dan tingkat infrastruktur. Dampaknya tidak hanya terasa secara ekonomi, 12 tetapi juga secara sosial, dengan potensi untuk menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan menyebabkan ketegangan sosial (Hukom dkk., 2023). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dinamika dan faktor-faktor yang mendasari ketimpangan ekonomi antar wilayah menjadi sangat penting dalam upaya untuk merancang kebijakan yang efektif. Guna mengatasi permasalahan ini maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kondisi keuangan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat, mengidentifikasi sektor-sektor yang termasuk dalam kategori basis dan non-basis, serta menganalisis ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama, penelitian akan mengkaji secara rinci kondisi keuangan Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk pendapatan daerah, belanja daerah, serta pos-pos pendapatan dan pengeluaran yang signifikan.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat dengan lingkup kajian yaitu Kabupaten berupa gambaran nilai PDRB yang ada pada setiap sektor. Selain itu, dilakukan pula perhitungan nilai ketimpangan wilayah dengan lingkup kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode deskriptif kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan fenomena atau variabel yang diteliti melalui pengumpulan dan analisis data numerik. Dalam metode ini, peneliti menggunakan teknik-teknik statistik untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan tujuan menyajikan karakteristik-karakteristik utama dari fenomena yang diamati (Suyitno, 2018). Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menyajikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang fenomena yang diteliti, tanpa melakukan inferensi atau menyimpulkan hubungan sebab-akibat. Variabel penelitian dan teknik pengolahan yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Variabel dan Teknik Pengolahan

No	Tujuan	Variabel Penelitian	Pengolahan
1	Menganalisis kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2. Jumlah Total Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 3. Jumlah Nilai Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah	1. Perhitungan Derajat <i>Desentralisasi Fiskal</i> (DDF) 2. Perhitungan Derajat Otonomi Fiskal (DOF)
2	Menganalisis Sektor Basis Ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019-2023	Location Quotient (LQ) 1. Jumlah PDRB suatu Sektor Kabupaten Sumbawa Barat 2. Jumlah PDRB total Kabupaten Sumbawa Barat 3. Jumlah PDRB suatu sektor tingkat Provinsi NTB 4. Jumlah PDRB total tingkat Provinsi NTB	Perhitungan <i>Location Quotient</i> (LQ)
3	Menganalisis nilai ketimpangan Ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat	Indeks Williamson 1. PDRB perkapita kabupaten Sumbawa Barat 2. PDRB perkapita rata-rata Provinsi NTB 3. Jumlah penduduk kabupaten Sumbawa Barat 4. Jumlah penduduk provinsi	Perhitungan Indeks Williamson

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan sejauh mana kebijakan fiskal dan wewenang terkait pengelolaan keuangan publik telah dipindahkan dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan daerah atau lokal. Dalam konteks ini, fiskal mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan pendapatan (pajak dan penerimaan lainnya) dan pengeluaran (belanja dan investasi) pemerintah. Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki nilai PAD yang fluktuatif, dalam rentang tahun 2019 sampai dengan 2023 begitu juga untuk tingkat pendapatan daerahnya. Terdapat rentang nilai antara tahun 2019 sampai 2020 yang signifikan akibat dari adanya Covid-19.

Adanya fenomena Covid-19 memiliki dampak yang besar khususnya pada penurunan aktivitas ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat. Banyak bisnis harus menutup mengurangi jam operasinya, terutama sektor-sektor seperti pertambangan, pariwisata dan ritel. Hal ini menyebabkan penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi lokal. Banyak pekerja kehilangan pekerjaan karena bisnis menutup atau mengurangi operasional. Pengangguran meningkat, terutama di sektor informal yang tidak memiliki jaring pengaman sosial yang memadai. Selain itu, pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi turun karena aktivitas ekonomi yang menurun. Ini mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik dan mendanai proyek-proyek infrastruktur. Kondisi tersebut berdampak pada nilai derajat desentralisasi fiskal yang kontras antara tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya. Nilai Derajat Desentralisasi Fiskal untuk tahun 2019 hanya sekitar 6% dan masuk kedalam kategori sangat kurang, sedangkan untuk tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan angka yang sama yaitu 13% dan masuk ke dalam kategori kurang. Detail terkait nilai Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Sumbawa Barat

Tahun	PAD	TPD	DDF
2019	Rp 68.407.534.650	Rp 106.145.861.421.000	6%
2020	Rp 119.963.426.440	Rp 94.782.632.846.000	13%
2021	Rp 141.792.640.000	Rp 105.778.797.400.000	13%
2022	Rp 131.871.340.000	Rp 104.798.727.430.000	13%
2023	Rp 134.062.620.000	Rp 106.098.797.390.000	13%

Sumber: Hasil perhitungan (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan, bahwa kondisi desentralitas yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat masuk ke dalam kategori kurang. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah pusat, tetapi masih belum mencapai tingkat penuh otonomi. Pemerintah pusat masih memiliki kendali yang signifikan terhadap kebijakan fiskal secara umum.

Kendali dari pemerintah pusat ini masih dirasakan pada Pengaturan Pajak Nasional (PPN). Pemerintah pusat biasanya memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengumpulkan pajak-pajak nasional seperti pajak penghasilan, pajak nilai tambah, dan pajak lainnya. Meskipun daerah mungkin memiliki kewenangan untuk mengenakan beberapa jenis pajak daerah, pajak-pajak utama yang menghasilkan pendapatan besar sering kali tetap diatur dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Selain peran besar pemerintah pusat juga ada pada ranah kewenangan dalam pengeluaran. Pemerintah daerah memiliki keterlibatan yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan nasional yang lebih luas, khususnya dalam hal kebijakan fiskal atau alokasi dana dari anggaran nasional.

2. Derajat Otonomi Fiskal

Perhitungan Derajat Otonomi Fiskal di Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan mulai tahun 2019 - 2023. Fluktuasi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bantuan Pemerintah Pusat (BPP) berdampak pada nilai derajat otonomi fiskal. Berdasarkan hasil perhitungan DOF di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2019 merupakan nilai terendah yaitu 11,3. Hal ini di pengaruhi oleh adanya Covid-19 yang mempengaruhi nilai PAD dan berdampak pada nilai DOF. Selain itu, pada tahun 2019 dan 2020 DOF Kabupaten Sumbawa Barat masuk kedalam kategori eksklusif. Hal ini mendeskripsikan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat masih dalam tahapan yaitu fokus pada batasan-batasan yang jelas antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Kategori ini menekankan bahwa hanya pemerintah pusat yang memiliki wewenang tertentu dalam urusan fiskal tertentu, seperti pengelolaan pajak tertentu atau alokasi dana yang spesifik. Namun, pada tahun-tahun berikutnya yaitu 2021 sampai dengan 2023 terjadi peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pula pada peningkatan nilai derajat otonomi fiskal sehingga kategori DOF meningkat menjadi konkurensi. Nilai Perhitungan Derajat Otonomi Fiskal dapat dilihat pada tabel 3.

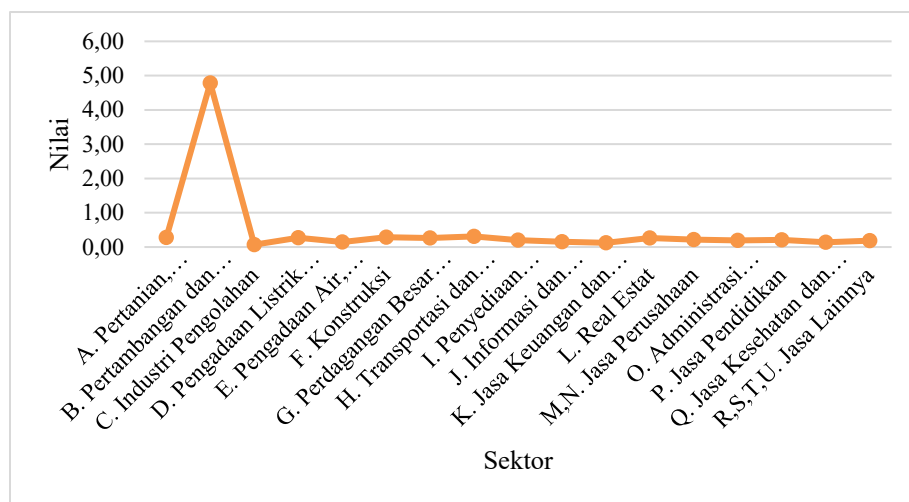
Tahun	PAD	BPP/BPN	DOF	Kategori
2019	Rp 68.407.534.650	Rp 60.421.722.280	11,3	Eksklusif
2020	Rp 119.963.426.440	Rp 61.955.960.000	19,4	Eksklusif
2021	Rp 141.792.640.000	Rp 61.843.000.303	22,9	Konkurensi
2022	Rp 131.871.340.000	Rp 60.721.843.160	21,7	Konkurensi
2023	Rp 134.062.620.000	Rp 60.931.931.820	22,0	Konkurensi

Sumber: Hasil perhitungan, (2023)

Kategori konkurensi yaitu terdapat tumpang tindih atau bersamaan antara kewenangan fiskal pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, baik pemerintah pusat maupun Kabupaten Sumbawa Barat dapat memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengelola sebagian urusan fiskal tertentu.

3. Sektor Basis Ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat

Hasil perhitungan nilai LQ dari tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif, untuk mengetahui rata-rata nilai selama 5 tahun tersebut dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Rata-rata Nilai LQ tahun 2019-2023 di Kabupaten Sumbawa Barat

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata LQ, menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian yang paling dominan dan memiliki nilai yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu 4,78.

Maka sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor basis sekaligus sektor unggulan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini berkorelasi dengan berbagai bentuk kegiatan yang ada sehingga menimbulkan perputaran investasi, dan dana serta berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka dari itu dalam perhitungan LQ memiliki nilai yang tinggi apabila dibandingkan dengan sektor lainnya.

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada, bahwa yang masuk ke dalam kategori sektor unggulan hanya sektor pertambangan dan penggalian sebab nilai LQ lebih dari 1 (satu). Sektor lainnya masih masuk ke dalam sektor non unggulan. Tiga sektor lainnya yang memiliki nilai tertinggi dan berpotensi untuk dikembangkan yaitu sektor transportasi dan pergudangan (0,31), sektor konstruksi (0,29) dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (0,29). Ketiga sektor tersebut meskipun masih masuk ke dalam kategori non unggulan, namun apabila dilihat dari nilai rata-ratanya merupakan sektor yang memiliki perkembangan signifikan dari tahun ke tahun. Sedangkan sektor yang memiliki nilai terendah yaitu industri pengolahan dengan nilai 0,07. Hasil perhitungan LQ persektor dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Perhitungan LQ di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019-2023

Sektor PDRB	Nilai LQ					Rata-rata LQ	Kategori
	2019	2020	2021	2022	2023		
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,28	0,27	0,27	0,28	0,29	0,28	Sektor Non Unggulan
B. Pertambangan dan Penggalian	4,28	4,66	4,67	4,74	5,57	4,78	Sektor Unggulan
C. Industri Pengolahan	0,08	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07	Sektor Non Unggulan
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,26	0,26	0,28	0,28	0,28	0,27	Sektor Non Unggulan
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,14	0,15	0,12	0,14	0,15	Sektor Non Unggulan
F. Konstruksi	0,25	0,28	0,28	0,31	0,34	0,29	Sektor Non Unggulan

Sektor PDRB	Nilai LQ					Rata-rata LQ	Kategori
	2019	2020	2021	2022	2023		
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,33	0,26	0,26	0,22	0,25	0,27	Sektor Non Unggulan
H. Transportasi dan Pergudangan	0,35	0,30	0,32	0,26	0,30	0,31	Sektor Non Unggulan
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,24	0,20	0,21	0,16	0,18	0,20	Sektor Non Unggulan
J. Informasi dan Komunikasi	0,20	0,15	0,15	0,13	0,15	0,16	Sektor Non Unggulan
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,14	0,11	0,12	0,11	0,11	0,12	Sektor Non Unggulan
L. Real Estat	0,33	0,25	0,26	0,22	0,25	0,26	Sektor Non Unggulan
M,N. Jasa Perusahaan	0,26	0,21	0,21	0,18	0,21	0,22	Sektor Non Unggulan
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,24	0,19	0,19	0,16	0,19	0,19	Sektor Non Unggulan
P. Jasa Pendidikan	0,26	0,20	0,21	0,18	0,20	0,21	Sektor Non Unggulan
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	0,14	0,14	0,12	0,14	0,14	Sektor Non Unggulan
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,23	0,19	0,19	0,16	0,18	0,19	Sektor Non Unggulan

Sumber: Hasil perhitungan (2023)

Perkembangan sektor transportasi dan pergudangan di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan tren positif, hal ini didorong oleh adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dalam konteks yang lebih luas, sektor transportasi dan pergudangan di Indonesia tumbuh sebesar 16,99% pada tahun 2022, menjadikannya salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan ini turut didorong oleh peningkatan mobilitas dan perdagangan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023).

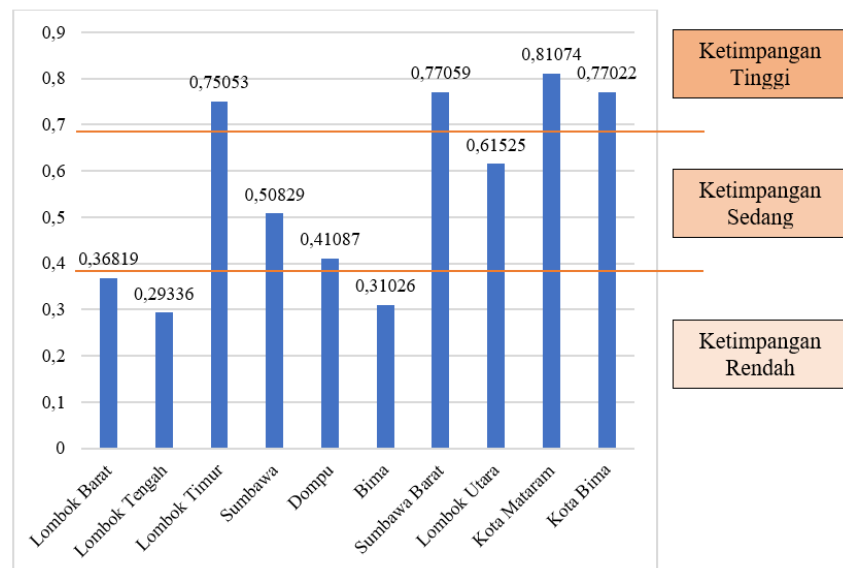
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalan, yang secara tidak langsung juga mempengaruhi sektor transportasi dan pergudangan. Nilai tambah dari sektor-sektor ini menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap PDB daerah. Secara keseluruhan, infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung sektor transportasi dan pergudangan terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan logistik dan distribusi di wilayah tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap perekonomian lokal di masa mendatang (Badan Pusat Statistik Sumbawa Barat, 2023)

Perkembangan sektor konstruksi di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan dari 2,25% pada tahun 2022 menjadi 3,32% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas konstruksi di daerah tersebut (Badan Pusat Statistik Sumbawa Barat, 2023). Selain itu, ada proyek besar yang sedang berjalan yaitu pembangunan smelter tembaga oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Proyek ini diharapkan selesai pada akhir tahun 2024 dan diharapkan akan meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor konstruksi serta sektor lainnya di Sumbawa Barat. Proyek ini juga menunjukkan investasi besar di sektor konstruksi dengan nilai investasi yang signifikan. Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) tahun 2024, terdapat 65 usulan skala prioritas yang sebagian besar terkait dengan pembangunan infrastruktur, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong pembangunan di sektor konstruksi (PPID, 2024). Secara keseluruhan, sektor konstruksi di Kabupaten Sumbawa Barat sedang berkembang pesat, didorong oleh investasi besar dan perencanaan pemerintah daerah yang fokus pada pengembangan infrastruktur.

4. Nilai Ketimpangan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pengukuran ketimpangan ekonomi menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan mengetahui wilayah mana yang mengalami ketimpangan tinggi, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi di seluruh wilayah. Indeks Williamson membantu mengidentifikasi tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah dengan memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa jauh distribusi pendapatan di berbagai wilayah dibandingkan dengan rata-rata.

Hal ini penting untuk memahami daerah mana yang tertinggal dan membutuhkan perhatian khusus. Hasil perhitungan indeks williamson untuk masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat di lihat pada gambar 2.



Gambar 2. Grafik Nilai Ketimpangan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi NTB tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan indeks williamson, Kota Mataram merupakan daerah yang memiliki nilai ketimpangan yang paling tinggi yaitu 0,81. Kota Mataram memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang tergolong tinggi disebabkan oleh konsentrasi sektor perdagangan yang dominan dan kurangnya sektor-sektor lain yang berkembang. Selain itu, Kota mataram juga merupakan pusat administrasi, pendidikan dan komersial utama di NTB dengan dominasi sektor pengangkutan. Sebagai ibu kota provinsi, kota ini memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan daerah lain di NTB. Gini ratio untuk daerah perkotaan, termasuk Kota Mataram, adalah 0,383 pada Maret 2024 (BPS, 2024), terdapat ketimpangan pendapatan yang tinggi antara penduduk kota dan daerah sekitarnya. Hal ini dipicu oleh adanya urbanisasi yang menyebabkan masalah perumahan dan kemacetan.

Kota Bima memiliki nilai indeks williamson sebesar 0,77 yang mengindikasikan ketimpangan ekonomi yang tinggi. Sebagai pusat perdagangan dan administrasi di wilayah timur NTB. Kota Bima juga memiliki kesenian dan budaya yang kaya sehingga menjadi daya tarik wisata. Produk pertanian seperti jagung dan bawang merah menjadi komoditas utama. Namun terdapat permasalahan ekonomi berupa ketergantungan pada sektor pemerintahan dan kurangnya diversifikasi ekonomi serta perlu adanya peningkatan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata (Meilani & Wuryandani, 2012). Secara keseluruhan, setiap daerah di NTB memiliki potensi ekonomi yang unik namun juga menghadapi tantangan yang memerlukan perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Daerah lainnya yang masuk ke dalam kategori ketimpangan tinggi yaitu Kabupaten Lombok Timur (0,75). Digolongkan sebagai daerah relatif tertinggal dengan ketimpangan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh dominasi sektor tanaman bahan makanan yang tidak berkembang secara merata (Cita, 2016). Daya Tarik ekonomi yang ada di Kabupaten Lombok Timur yaitu berupa pariwisata Air terjun Tiu Kelep dan Pantai Pink yang menjadi destinasi wisata alam. Sektor pertanian dan perikanan yang mendominasi perekonomian. Terdapat pula potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata. Pertanian padi dan hasil laut merupakan andalan perekonomian dan menyumbang pendapatan asli daerah. Permasalahan Ekonomi yang dialami Kabupaten Lombok Timur yaitu infrastruktur yang kurang memadai dan akses pasar yang terbatas. Ketergantungan pada sektor tradisional menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga menimbulkan disparitas pendapatan antar masyarakat (Primadianti & Sugiyanto, 2020).

Kabupaten Sumbawa Barat memiliki nilai indeks williamson sebesar 0,77 yang menandakan bahwa daerah ini masuk ke dalam klasifikasi ketimpangan tinggi. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi sektor perdagangan yang dominan dan kurang berkembangnya sektor-sektor lainnya. Daerah ini tergolong sebagai daerah cepat maju dan cepat tumbuh, namun distribusi ekonomi tidak merata (Meilani & Wuryandani, 2012).

Daya Tarik ekonomi yang ada di Sumbawa Barat yaitu tambang emas yang dikelola oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Tambang ini memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi daerah melalui pajak, royalti, dan lapangan kerja. Potensi Ekonomi lainnya berupa pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun potensi utama berupa pertambangan emas dan tembaga yang menjadi sektor unggulan dan mendominasi perekonomian daerah. Permasalahan Ekonomi berupa ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan 68 menyebabkan ketimpangan ekonomi (Purwadinata dkk., 2022). Ketimpangan ekonomi masyarakat dipicu oleh perbedaan pendapatan yang signifikan. Karyawan tambang cenderung memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor lain. Fluktuasi Harga Komoditas mengakibatkan ketergantungan pada sektor pertambangan, sehingga membuat Kabupaten Sumbawa Barat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi lokal. Ketika harga komoditas turun maka akan mempengaruhi pendapatan daerah maupun pekerjaan (Royan dkk., 2019).

Terdapat 3 (tiga) daerah yang masuk ke dalam kategori ketimpangan sedang yaitu Kabupaten Lombok Utara (0,61), Sumbawa (0,50) dan Dompu (0,41). Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah yang relatif tertinggal dan memiliki ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh dominasi sektor tanaman bahan makanan yang tidak berkembang pesat (Sutanty & Zulkia, 2022). Salah satu faktor karena homogenitas pengembangan sumber daya alam pada sektor tanaman bahan makanan yang berdampak pada rendahnya nilai ketimpangan ekonomi. Daya Tarik Ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Utara adalah wisata alam seperti Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air yang menjadi destinasi wisata internasional. Pariwisata Gili memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Namun, ketergantungan pada sektor pariwisata yang rentan terhadap krisis global seperti pandemi sehingga perlu adanya diversifikasi ekonomi dan peningkatan infrastruktur (Meilani & Wuryandani, 2012).

Kabupaten Sumbawa dikelompokkan sebagai daerah maju tapi lamban tumbuh serta menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi meskipun daerah ini mengalami perkembangan. Ketimpangan ini terkait dengan dominasi sektor pertanian pangan. Daya Tarik Ekonomi yang ada di Kabupaten Sumbawa yaitu wisata berupa kuda pacu dan produk susu kuda liar. Selain itu, potensi pariwisata alam seperti Pantai Lakey yang terkenal untuk berselancar. Potensi Ekonomi selain pertanian yaitu peternakan, perikanan. Sektor pertanian dan peternakan, terutama kuda dan sapi, menjadi andalan perekonomian daerah. Permasalahan Ekonomi yang dihadapi Kabupaten Sumbawa yaitu infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya akses ke pasar internasional serta diversifikasi ekonomi masih terbatas pada sektor tradisional (Fitriyani dkk., 2019).

Kabupaten Dompu juga merupakan daerah dengan kategori ketimpangan sedang. Hal ini diakibatkan oleh heterogenitas pendapatan masyarakat serta ketergantungan pada pertanian dan perikanan yang rentan terhadap perubahan iklim dan harga komoditas. Pertanian jagung dan hasil laut merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi daerah. Ketergantungan ini membuat pendapatan petani dan nelayan tidak stabil, sehingga memperparah ketimpangan ekonomi. Kekurangan diversifikasi ekonomi menyebabkan sebagian besar pendapatan dan lapangan kerja terkonsentrasi pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering kali memberikan penghasilan rendah dan tidak stabil. Infrastruktur yang kurang memadai, termasuk jalan dan fasilitas transportasi, membatasi akses ke pasar dan layanan dasar bagi banyak penduduk. Ini menghambat mobilitas ekonomi dan akses terhadap peluang yang lebih baik (Sutanty & Zulkia, 2022). Meskipun demikian, Kabupaten dompu juga memiliki daya tarik ekonomi berupa wisata alam Gunung Tambora.

Daerah-daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masuk ke dalam klasifikasi ketimpangan rendah yaitu Kabupaten Lombok Barat (0,36), Lombok Tengah (0,29) dan Bima (0,31). Kabupaten Lombok Barat termasuk daerah berkembang cepat, namun masih terdapat distribusi ekonomi yang kurang merata, yang ditandai dengan beberapa kelompok masyarakat menikmati pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan yang lain (Meilani & Wuryandani, 2012).

Daya tarik ekonomi yang ada di Kabupaten Lombok Barat yaitu wisata alam seperti Pantai Senggigi dan hutan wisata Narmada. Lokasi yang dekat dengan pusat kota Mataram menjadikan daerah ini strategis. Permasalahan ekonomi yang dihadapi berupa infrastruktur pariwisata yang masih kurang memadai. Kurangnya diversifikasi ekonomi menyebabkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat (Cita, 2016).

Kabupaten Lombok Tengah termasuk daerah berkembang cepat namun masih terdapat distribusi ekonomi yang kurang merata (Zamroni, 2015). Keberadaan Pusat Pariwisata Mandalika yang merupakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mulai menimbulkan adanya ketimpangan 70 ekonomi karena fokus investasi dan infrastruktur di satu area, sementara daerah lain tertinggal. Ketimpangan pendapatan meningkat karena sebagian besar manfaat ekonomi terpusat di sekitar Mandalika. Selain itu, perbedaan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan antara daerah sekitar Mandalika dan daerah lain di Lombok Tengah menyebabkan ketimpangan dalam kualitas hidup masyarakat (Royan dkk., 2019).

Kabupaten Bima termasuk daerah dengan tingkat ketimpangan yang rendah. Terdapat daya tarik ekonomi berupa kesenian dan budaya Bima yang unik, serta potensi wisata alam (Bahri dkk., 2024). Serta terdapat sektor pertanian dan peternakan yang kuat. Produk-produk pertanian seperti bawang merah dan jagung menjadi komoditas utama. Permasalahan Ekonomi yang dihadapi yaitu keterbatasan terhadap akses ke pasar yang lebih luas sehingga potensi dan produksi kurang berkembang. Ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim juga menjadi permasalahan utama. (Sutanty & Zulkia, 2022).

Secara keseluruhan, ketimpangan ekonomi di NTB dipengaruhi oleh konsentrasi sektor-sektor ekonomi tertentu di masing-masing wilayah dan kurangnya diversifikasi ekonomi yang merata. Ketergantungan pada sektor-sektor spesifik tanpa adanya pengembangan sektor lain menyebabkan kesenjangan pendapatan yang signifikan.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian terkait Analisis Kondisi dan Potensi Ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu:

1. Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menurut nilai Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) tahun 2019 yaitu 6% dan masuk kedalam kategori sangat kurang, sedangkan untuk tahun 2020 sampai 2023 yaitu 13% dan masuk ke dalam kategori kurang. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tingkat otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah pusat, tetapi pemerintah pusat masih memiliki kendali yang signifikan terhadap kebijakan fiskal secara umum. Sedangkan Nilai Derajat Otonomi Fiskal (DOF) tahun 2019 merupakan nilai terendah yaitu 11,3 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 22 dan masuk ke dalam klasifikasi konkurensi yaitu terdapat tumpang tindih atau bersamaan antara kewenangan fiskal pemerintah pusat dan daerah.
2. Sektor pertambangan dan penggalian (4,78) merupakan sektor basis ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan perhitungan *Location Quotient* (LQ). Tiga sektor lainnya yang memiliki nilai tertinggi dan berpotensi yaitu sektor transportasi dan pergudangan (0,31), sektor konstruksi (0,29) dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (0,29). Ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki perkembangan signifikan dari tahun ke tahun. Sedangkan sektor yang memiliki nilai terendah yaitu industri pengolahan dengan nilai 0,07.
3. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki nilai ketimpangan sebesar 0,77 dan masuk kedalam kategori ketimpangan tinggi. Hal ini dipicu oleh adanya fluktuasi harga komoditas tambang global dan belum ada diversifikasi ekonomi sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi lokal. Ketika harga komoditas turun, maka akan mempengaruhi pendapatan daerah maupun lapangan pekerjaan sehingga berdampak pada ketimpangan ekonomi yang lebih luas.

E. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, berikut beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian ini sebatas pada pengolahan data sekunder dan kajian pustaka, maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan tinjauan langsung atau pengambilan data primer sehingga dapat dilakukan pemetaan potensi secara detail
2. Rentang waktu perhitungan dan analisis terkait kondisi keuangan daerah dapat diperluas agar diketahui perubahan tren nilai sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat diharapkan mampu memanfaatkan potensi pada setiap sektor yang ada, dan mampu mengimplementasikan berbagai strategi pembangunan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta meminimalisir tingkat ketimpangan ekonomi yang ada.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Awandari, Luh Putu Putri dan Indrajaya, I Gst Bgs. (2016). Pengaruh Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja dengan Lokasi Penelitian di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 5(12). 1435-1462.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka Tahun 2023*. Diakses Tanggal 14 Maret 2024. <https://www.bps.go.id/>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Kabupaten Sumbawa Barat dalam Angka Tahun 2023*. Diakses Tanggal 18 Maret 2024. <https://www.bps.go.id/>.
- BPS Indonesia. (2023). *Nilai Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 3 di Indonesia*. Diakses Tanggal 15 Juni 2024. <https://www.bps.go.id/>.
- Bahri, N., Pratama, I. N., Amirulhak, M. H., Azhari, M. M., & Yullah, N. (2024). *Dinamika Sosial-Ekonomi: Analisis Kemiskinan Dan Ketimpangan Sosial Masyarakat Kabupaten Bima*. *LPPM UMMAT*, 3(1), 280–289.
- Christianingrum, R., & Aida, A. N. (2021). *Elasticity of Regional Original Income in the Era of Regional Autonomy*. *Jurnal Budget*. 6(1), 58–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.22122/jurnalbudget.v6i1.73>.

- Cita, F. P. (2016). *Analysis of Economic Growth Sources and Regional Disparities in West Nusa Tenggara Province*. *JEBI*, 1(2), 33–41.
- Fitriyani, I., Syafruddin, Asmini, & Sumbawati, N. K. (2019). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Sumbawa*. *Jurnal Media Infomatika*, 5(2), 182–188.
- Halim, Abdul. (2012). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Hukom, A., Saraswati, D., Nasir, D., Ka'arieni, Kusin, K., Virgiyanti, L., Yulianti, N., Nomeritae, Kristhy, M. E., Ravenalla, Abdurrahman Al Hakim, Sampurna Putra S., Rendy Muhamad Iqbal, & Salampak Dohong. (2023). *Menapak Jejak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (N. Yulianti, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Deepublish.
- Meilani, H & Wuryandani. D. (2012). Pola Perkembangan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*. 3(2). 1-20. <https://doi.org/10.22212/jekp.v3i2.110>.
- PPID KSB. (2024). *Musrenbang RKPD 2024 Pemda KSB*. <https://ppid.sumbawabaratkab.go.id/en/article/musrenbang-rkpd-2024-pemda-ksb-ini-65-skala-prioritas-usulan-dari-kecamatan>.
- Primadianti, N., & Sugiyanto, C. (2020). *Ketimpangan Regional, Pertumbuhan Ekonomi Pro Poor dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–20.
- Purwadinata, S., Susmawati, D., & Sumbawati, N. K. (2022). *Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sumbawa Barat*. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(3), 350–360. <http://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/jebPp.350-360>.
- Rajab, Abdul & Jamaludin, K. (2021). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah dan Tingkat Kemiskinan*. *Jurnal Forum Ekonomi*, 23(4), 607-614. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>.
- Royan, M., Riyanto, W. H., & Nuraini, I. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapat di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 3(3), 365–375.
- Suparmoko, M.A., 2003. *Keuangan Negara dalam teori dan praktek, Edisi ke-5*. Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Sutanty, M., & Zulkia, A. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(1), 1–10. <http://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/jebPp.1-10>.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Jakarta: Akademia Pustaka

Zamroni, Abdul. A. (2015). Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Ketimpangan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012. *Tesis*. Ekonomi Pembangunan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.